

---

## Penyuluhan Tentang Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Nikel di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan

### INFO PENULIS

Arsalim  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[dr.arsalim2021@gmail.com](mailto:dr.arsalim2021@gmail.com)  
0811400029

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148  
Vol. 2, No. 2, Desember 2022  
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2022 Almufi All rights reserved

---

### *Saran Penulisan Referensi:*

Arsalim. (2022). Penyuluhan Tentang Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Nikel di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2), 118-126.

### **Abstrak**

Kegiatan penambangan di Desa Watudemba Kecamatan Palangga berdampak pada masalah-masalah pencemaran lingkungan, utamanya pencemaran disekitar pelabuhan Jetty di bentaran pantai. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat untuk mengawasi operasional perusahaan yang telah berdampak buruk bagi rakyat. Hal lain yang selalu menjadi perdebatan adalah pemanfaatan lahan masyarakat yang masuk dalam IUP perusahaan. Masalah-masalah lain seperti CSR dan reklamasi juga belum dioptimalkan dengan baik. CSR belum menyentuh aspek keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat, demikian pula halnya dengan reklamasi yang terkesan asal-asalan sehingga menimbulkan masalah lingkungan. Oleh sebab itu, perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam utamanya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pertambangan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Reklamasi diarahkan untuk peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat disekitar wilayah pertambangan serta pemberian royalti secara transparan serta perlunya mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam berbagai aktivitas pertambangan didaerah tersebut.

**Kata Kunci:** Pertambangan Nikel, Dampak Sosial Ekonomi dan penyuluhan

### Abstract

Mining activities in Watudemba Village, Palangga District have an impact on environmental pollution problems, especially pollution around the Jetty port on the beach. In addition, there is a lack of coordination between the district, provincial and central government to company operations which have had a negative impact on the people. Another thing that is always being debated is the use of community land that is included in the company's IUP. Other issues such as CSR and reclamation have also not been optimized properly. CSR has not yet touched on the sustainability of the community's economic life, as well as reclamation which seems to be careless, causing environmental problems. Therefore, there is a need for good coordination between the district, provincial and central government in the main monitoring and evaluation of mining implementation. Corporate Social Responsibility (CSR) and Reclamation are directed at improving the economic life of the community around the mining area as well as providing transparent royalties and the need to optimize the use of local workers in various mining activities in the area.

**Keywords:** Nickel Mining, Social Economic Impact and Counseling

### A. Pendahuluan

Kabupaten Konawe Selatan dengan luas wilayah 451.421 Ha, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 secara geografis terletak dibagian selatan khatulistiwa, melintang dari utara ke selatan antara 3°58,56' dan 4°31,52' LS, membujur dari barat ke timur antara 121,58' dan 123,16' bujur timur, sedangkan secara Administratif Kabupaten Konawe Selatan dibatasi oleh wilayah (1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lambuya, kecamatan Pondidaha, kecamatan Sampara Kabupaten Konawe serta kecamatan Baruga dan kecamatan Poasia Kota Kendari. (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Tiworo. (3) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Rumbia Kabupaten Buton serta kecamatan Lambandia dan kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka. (4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Toba Besar Kabupaten Muna dan Selat Tiworo Topografi wilayah Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah, yang dapat dibedakan atas 5 kelas berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yaitu 0 – 25 m (8,11%), 25-100 (31,62%), 100-500 (39,38%), 500-1000 (13,66%) dan lebih dari 1.000 (7,23%), sedangkan berdasarkan kemiringan tanah dapat dibagi menjadi kemiringan 00-02% (seluas 30,52%), 03-15% (seluas 32,61%), 16-40% (seluas 27,33%) dan diatas 41% (seluas 9,54%). Jenis tanah terdiri atas latosol (23,35%), podzolik (28,15%), organosol (4,71%), mediteran (3,39%), aluvial (4,80%) dan tanah campuran (35,59%).

Salah satu potensi sumber daya alam kabupaten Konawe selatan adalah pertambangan. Potensi pertambangan mineral yang cukup menjanjikan ditunjukkan oleh hasil penelitian *Fraser institute* yang menyatakan bahwa prospek mineral di Indonesia menduduki peringkat enam teratas di dunia. Indonesia menempati posisi produsen terbesar ke dua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi kedelapan untuk komoditas batubara (Widayati, 2011). Dengan hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa Indonesia sudah sepatutnya dikatakan sebagai negara yang kaya akan kekayaan dan potensi alamnya baik dari kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui maupun yang dapat diperbaharui. Sebagai negara pengekspor nikel, Indonesia memiliki cadangan nikel mencapai 3,2 miliar ton atau 5% dari cadangan nikel seluruh dunia. Pada tahun 2009 produksi ferronikel Indonesia, yaitu 12.550 metrik ton, dan produksi nikel 6, 52 juta metric ton. Produksi ferronikel dunia adalah 1,38 juta ton dan konsumsinya adalah sebesar 1.3 juta ton. Produksi dan konsumsi nikel dunia meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 2,4% pertahun (*International Nickel Study*, 2009).

Ada beberapa wilayah yang menjadi daerah tempat perusahaan tambang utamanya nikel melakukan eksplorasi utamanya Kabupaten Konawe Selatan, yaitu di wilayah Tinanggea, Palanga, Palangga Selatan, Laeya dan Laonti. Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, yaitu terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, meningkatkan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang bekerja di perusahaan tambang. Meskipun demikian terdapat pula dampak negatif dari sisi kerusakan lingkungan dan juga dari aspek sosial ekonomi dan budaya setempat.

Tabel 1. Data tentang perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan

Wilayah		Nama perusahaan	Jenis Bahan Tambang
Kabupaten/kota	Kecamatan		
Konawe Selatan	Tinanggea	Baula Petra Buana, PT	Nikel
Konawe Selatan	Laeya	Billy Indonesia, PT	Nikel
Konawe Selatan	Palangga Selatan	Generasi Agung Perkasa, PT	Nikel
Konawe Selatan	Laonti	Gerbang Multi Sejahtera, PT	Nikel
Konawe Selatan	Tinanggea	Ifishdeco, PT	Nikel
Konawe Selatan	Laeya	Integra Mining Nusantara, PT	Nikel
Konawe Selatan	Palangga Selatan	Jagad Rayatama, PT	Nikel
Konawe Selatan	Palangga Selatan	Macika Mada Madana, PT	Nikel
Konawe Selatan	Laeya	MegaNikel Indonesia, PT	Nikel
Konawe Selatan	Palangga Selatan	Mega Tambang Indonesia, PT	Nikel
Konawe Selatan	Palangga	Mega TambangNikel, PT	Nikel
Konawe Selatan	Palangga Selatan	Pertambangan Bumi Anoa, PT	Nikel
Konawe Selatan	Palangga	Visi Debtindo, PT	Nikel
Konawe Selatan	Laeya	Wijaya Inti Nusantara, PT	Nikel

**Sumber/Source** : Direktori Perusahaan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

Karena luasnya cakupan wilayah pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Selatan, maka fokus pengabdian kepada masyarakat (PKM) hanya di Kecamatan Palangga, khususnya di Desa Watudemba, yaitu dalam wilayah IUP PT. Sambas Mineral Mining. Hadirnya perusahaan ini diharapkan dapat memperbaiki kehidupan desa menjadi lebih baik lagi secara ekonomi. Perusahaan pertambangan nikel di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan akan membawa pengaruh positif dan juga mempunyai suatu problematika negatif dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Palangga.

## B. Metodologi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di desa Watudemba Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, utamanya pada kelompok masyarakat disekitar wilayah tambang.

Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah memberikan kontribusi pemikiran melalui penyuluhan terhadap upaya meningkatkan pendapatan melalui CSR atau *community development* dan pencegahan kerusakan lingkungan sehingga terjadi pola pembangunan pertambangan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2002, dengan beberapa langkah yang dilakukan;

- 1) Melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat (kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak perusahaan)
- 2) Melakukan penyuluhan bersama dengan *stake holders*
- 3) Melakukan observasi dan peninjauan lapangan
- 4) Mendiskusikan tentang permasalahan yang dihadapi dilapangan
- 5) Mendiskusikan solusi yang di perlukan

## C. Hasil dan Pembahasan

Konawe Selatan khususnya wilayah desa cukup kaya akan sumber daya alam khususnya pertambangan nikel, merupakan salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan pendapatan baik bagi masyarakat setempat maupun bagi pemerintah daerah. Karena dapat menciptakan lapangan kerja dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dilapangan antara lain; masalah pencemaran lingkungan utamanya pencemaran disekitar pelabuhan Jetty di bentaran pantai sehingga mempengaruhi produksi tanaman rumput laut disekitarnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat untuk mengawasi operasional perusahaan yang telah berdampak buruk bagi rakyat dan ruang hidup. Meskipun kewenangan pertambangan nikel dan batu bara telah dialihkan ke pemerintah pusat tetapi fungsi koordinasi

pengawasan dan evaluasi harus tetap berjalan optimal. Hal lain yang selalu menjadi perdebatan adalah pemanfaatan lahan masyarakat yang masuk dalam IUP perusahaan.

Masalah-masalah lain seperti CSR dan reklamasi juga belum dioptimalkan dengan baik. CSR misalnya belum menyentuh aspek keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat, demikian pula halnya dengan reklamasi yang terkesan asal-asalan sehingga menimbulkan masalah lingkungan.



Dalam kegiatan penyuluhan disampaikan beberapa point-point penting yaitu;

- a. Keberadaan kegiatan pertambangan di Desa Watudemba khususnya perusahaan PT Sambas Minetral Mining tentunya diakui oleh pemerintah karena telah mengantongi Izin Usaha Produksi (IUP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Seluas kurang lebih 1.008 ha. Namun saat ini, sementara dalam proses perpanjangan IUP dan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya di Kementerian ESDM. Secara jensepsional tentunya kegiatan penambangan harusnya dilakukan secara *good mining practice* yang diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks usaha pertambangan adalah transformasi sumber daya tidak terbarukan (*un-renewable resources*) menjadi sumber daya pembangunan terbarukan (*renewable resources*), (Amien, dalam Lukman, 2020). Peningkatan nilai tambah (PNT) pertambangan harus berbasis sumber daya setempat atau nasional (*local resource based*), berbasis masyarakat (*community based*) dan berkelanjutan.
- b. Selain kegiatan penambangan tentunya pihak perusahaan harus memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan juga melakukan kegiatan reklamasi atau pasca tambang. Untuk kegiatan CSR sebaiknya bukan hanya dalam bentuk bantuan pembangunan fisik tetapi juga harus ada bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga tercipta *income generating* di masyarakat. Demikian pula halnya dalam kegiatan reklamasi terhadap bukaan lahan penambangan sebaiknya dilakukan penanaman untuk tanaman yang bisa menghasilkan pendapatan lainnya dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, seperti tanaman hortikultura atau tanaman yang bernilai ekonomi tinggi.
- c. Untuk menghindari konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola tambang PT. Sambas Mineral Mining. Konflik antara masyarakat dengan pihak pengelola tambang PT. Sambas Mineral Mining di dalam masyarakat maka diperlukan kesepakatan atau kesepakatan antara masyarakat utamanya dalam pemanfaatan lahan tambang yang menjadi milik masyarakat yang masuk dalam kawasan IUP perusahaan. Kesepakatan *royalty* tentunya harus jelas dan transparan untuk menghindari konflik.
- d. Perlunya pemanfaatan tenaga kerja lokal atau masyarakat lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Watudemba. Diharapkan bahwa 60 persen tenaga kerja kasar yang digunakan oleh perusahaan adalah mereka masyarakat setempat.
- e. Pentingnya pemerintah pusat, terutama KLHK dan KKP untuk melakukan audit lingkungan secara berkala terhadap seluruh perizinan dan operasi tambang.

- f. Agar koordinasi berjalan baik maka pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai regulasi Selain UU Minerba pemerintah daerah juga dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, yang memuat pembinaan dan pengawasan pertambangan Minerba oleh menteri, gubernur, bupati atau walikota. Kemudian ada juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 soal wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi pada perusahaan yang melanggar, dan juga UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Kegiatan peninjauan lapangan dilakukan bersama-sama untuk melihat sejauh mana aktivitas pertambangan di desa tersebut. Utamanya dalam melihat sejauhmana reklamasi yang dilakukan. Perusahaan melakukan penanaman bibit jabon untuk melakukan reklamasi pada lahan-lahan bukaan atau penambangan.



Gambar 1. Proses pembuatan lubang tanam



Gambar 2. Proses pemberian pupuk kompos yang sudah dicampur dengan pupuk urea dan kegiatan penanaman bibit

#### D. Kesimpulan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan penambangan di Desa Watudemba Konawe Selatan wilayah IUP PT Sambas Mineral Mining, maka disimpulkan bahwa, perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam hal pengawasan pelaksanaan pertambangan. Selain itu pula, permasalahan CS dan reklamasi diharapkan diarahkan untuk peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat disekitar wilayah pertambangan serta pemberian royalti secara transparan. Hal lain adalah perlunya mengoptimalkan tenaga kerja lokal dalam berbagai aktivitas pertambangan didaerah tersebut.

## E. Referensi

- Biro Pusat Statistik (BPS) Konawe Selatan. (2021).
- Gusbin, S. M., & Yusuf, B. (2019). Problematika Sosial Masyarakat Sekitar Aktivitas Pertambangan Nikel Pt Sambas Minerals Mining. *Jurnal Neo Societal*, 4(3).
- International Nickel Study Group. (2009). *Annual Report of the International Nickel Study Group*.
- Malanuang, L. (2009). Model Pembangunan Daerah Berkelanjutan Melalui Transformasi Struktur Bkonomi Berbasis Sumberdaya Pertambangan Ke Sumberdaya Lokal Terbarukan (Sustainable Local Development Model by Means Economic Structure Transformation From Mine Resources Basis). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 16(3), 167-175.
- Suriyani, B. B. (2019). Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. *Journal Publicuho*, 2(1), 58-64.
- Widayati, W. (2011). *Ekologi Manusia: Konsep, Implementasi, dan Pengembangannya*. Unhalu Press (kini Universitas Halu Oleo Press).